

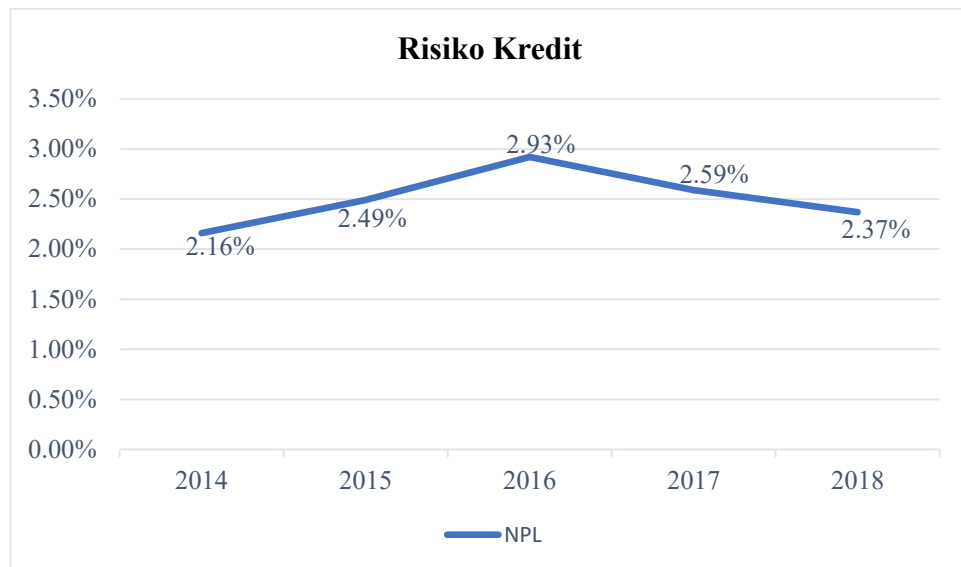
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki fungsi penting sebagai penghimpun dana dari pihak yang surplus dana dan sebagai penyalur dana kepada pihak yang defisit dana. Dana yang dikumpulkan berupa tabungan atau deposito, sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui kredit. Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak penyalur dana tentu tidak terlepas dari berbagai risiko yang ada, salah satunya yaitu risiko kredit.

Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan debitur dalam membayar kewajibannya kepada bank yang diukur menggunakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Tingginya rasio NPL pada bank akan mengganggu kinerja bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana. Penyebab tingginya NPL adalah kegagalan bank dalam menganalisis kredit serta dalam membuat keputusan pemberian kredit pada debitur mana yang pantas dan mampu untuk diberikan pinjaman.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.1, risiko kredit pada periode 2014-2016 mengalami tren peningkatan. Hal-hal yang menyebabkan peningkatan pada risiko kredit adalah karena adanya pelarangan ekspor barang, turunnya harga minyak mentah dan komoditas lainnya, serta perlambatan ekonomi domestik sebagai dampak dari penurunan perekonomian global, sehingga sejumlah debitur mengalami kebangkrutan dan tidak bisa membayar kembali utangnya kepada bank. Dengan demikian, bank tidak boleh gegabah dalam menyalurkan kredit pada sektor-sektor yang dapat memicu kenaikan NPL. Sedangkan pada periode 2017-2018, risiko kredit industri perbankan mengalami tren penurunan. Upaya yang dilakukan oleh industri perbankan untuk menurunkan NPL adalah dengan menghilangkan atau menghapus buku kredit yang bermasalah, serta melakukan restrukturisasi kredit. Kendati demikian, apabila bank terus-menerus menghapus kredit bermasalah dan melakukan restrukturisasi kredit, bukan tidak mungkin bank akan mengalami kerugian.



Gambar 1.1

Data Persentase Risiko Kredit pada Perusahaan Perbankan di Indonesia Periode 2014-2018

Sumber: OJK

Industri perbankan harus mulai mewaspadaikan ancaman kredit bermasalah. Perlambatan pertumbuhan kredit disebabkan karena adanya kondisi perekonomian yang kurang kondusif dan sejumlah sektor usaha yang menghadapi masalah. Hal tersebut membuat realisasi ekspansi kredit sejumlah bank diperkirakan tidak akan mencapai target dan berimbas pada kenaikan NPL. Bank diharapkan lebih teliti dalam memberikan kredit kepada perusahaan yang dinilai tidak menguntungkan bank. Apabila bank tetap memberikan kredit tanpa menganalisisnya terlebih dahulu, dikhawatirkan akan meningkatkan risiko kredit dan menjadi kredit bermasalah. Permasalahan kredit bermasalah dapat dikurangi dengan melakukan upaya *collection* secara intensif dan selalu berhati-hati dalam melakukan penyaluran kredit baru.

Penyaluran kredit baru tidak lepas dari keputusan CEO dalam pemberian kredit. *Chief Executive Officer* (CEO) bertanggung jawab penuh terhadap jalannya suatu perusahaan. CEO tidak boleh mengambil keputusan yang gegabah tanpa

memperhatikan baik buruknya sebuah keputusan dalam menyalurkan kredit. CEO berperan sebagai pengambil keputusan tingkat tinggi terkait kebijakan dan strategi agar dapat meminimalisir risiko, serta memberikan saran kepada jajaran di bawahnya. Seorang CEO biasanya ditunjuk oleh perusahaan berdasarkan pengalaman kerjanya dan keahlian yang dimilikinya untuk kepentingan bank. Oleh karena itu, perusahaan perbankan biasanya menunjuk seorang CEO yang dapat menguntungkan bank tersebut.

Salah satu keunggulan CEO adalah jika memiliki jaringan dan koneksi yang luas, termasuk dengan politisi dan birokrasi. CEO yang terhubung secara politik merupakan CEO yang memiliki pengalaman kerja sebagai bagian dari pemerintahan atau hal lain yang terkait dengan *Politically Exposed Person* (PEP) sebelum menjadi CEO suatu bank. CEO yang terkoneksi politik cenderung memberikan kredit kepada perusahaan yang terhubung secara politik juga. Selain itu, CEO yang terhubung secara politik dapat mengubah efisiensi dan keputusan kredit untuk melayani kepentingan politik yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan NPL suatu bank.

Kepemilikan pemerintah sendiri dapat mengkondisikan tingkat dan dampak koneksi politik pada keputusan kredit bank. CEO pada bank milik pemerintah cenderung terhubung secara politik dan mengejar tujuan sosial mereka selain untuk meningkatkan profit perbankan karena tekanan dari otoritas negara (Hung *et al.*, 2017; Du *et al.*, 2016). Perusahaan milik pemerintah dimanfaatkan oleh politisi melalui penunjukan pejabat pemerintah sebagai CEO perusahaan untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Bank milik pemerintah sulit untuk menolak campur tangan pemerintah, sehingga mereka cenderung memberikan akses kredit yang utama kepada perusahaan-perusahaan yang terhubung secara politik dengan probabilitas gagal bayar yang lebih tinggi (Khwaja dan Mian 2005). Oleh karena itu, bank milik pemerintah cenderung meningkatkan risiko kredit.

Penelitian yang menguji pengaruh dewan yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit dengan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi masih menerima perhatian yang relatif kurang. Boateng *et al.* (2019), meneliti pengaruh dewan yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit dengan struktur

kepemilikan sebagai variabel moderasi pada 88 bank di China selama periode 2003-2014. Hasilnya, dewan yang terhubung secara politik dapat meningkatkan risiko kredit, karena mereka mengalokasikan kredit kepada perusahaan-perusahaan pilihan mereka tanpa melakukan analisis kredit terlebih dahulu yang menyebabkan tingkat gagal bayar meningkat dan kepemilikan pemerintah memperkuat pengaruh positif dewan yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit, sedangkan kepemilikan swasta memperlemah pengaruh positif dewan yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit.

Hung *et al.* (2017), meneliti dampak dari CEO yang terhubung secara politik terhadap kinerja bank pada 70 bank di China selama tahun 2007-2014. Hasilnya, CEO yang terhubung secara politik dapat meningkatkan kinerja bank, karena CEO lebih mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan sebelumnya dan mempunyai keanekaragaman dalam karakteristik CEO. Penelitian tentang pengaruh koneksi politik terhadap risiko kredit masih jarang ditemukan di Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk meneliti pengaruh CEO yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit yang dimoderasi oleh kepemilikan pemerintah pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2014-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah CEO yang terhubung secara politik berpengaruh terhadap risiko kredit?
2. Apakah kepemilikan pemerintah memoderasi pengaruh CEO yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh CEO yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit.

2. Mengetahui efek moderasi kepemilikan pemerintah pada pengaruh CEO yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka manfaat yang dapat diambil untuk pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Bagi pemegang saham, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menambah informasi untuk meminimalisir risiko kredit dengan melakukan beberapa pertimbangan dalam penunjukan CEO, khususnya bagi bank milik pemerintah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan digunakan sebagai acuan untuk lebih lanjut mengembangkan penelitian sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bab yang masing-masing berisi penjelasan, diantaranya:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, yaitu pengaruh CEO yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit dan efek moderasi kepemilikan pemerintah pada pengaruh CEO yang terhubung secara politik terhadap risiko kredit. Bab ini juga membahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori terkait variabel yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga membahas hubungan antar variabel sebagai landasan perumusan hipotesis penelitian, penelitian terdahulu, model analisis, dan kerangka berpikir.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur penentuan sampel, serta teknik analisis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang terdiri atas gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan, serta saran terhadap pihak-pihak tertentu terkait dengan pengambilan keputusan selanjutnya di masa mendatang.